

PENINGKATAN KEEFEKTIFAN PROTEKSI BIODIVERSITAS KAWASAN DILINDUNGI MELALUI PENDEKATAN KEBIJAKAN PENGGUNAAN LAHAN DAN PENATAAN KELEMBAGAAN PENYANGGA

*Sambas Basuni*¹⁾

*Tutu Sunarminto*²⁾, *Agus P. Kartono*²⁾

Isu penting pengelolaan daerah penyangga adalah bahwa lahan dan produk-produknya merupakan dan akan terus menjadi sumberdaya terbatas bagi penduduknya yang terus meningkat, dan konflik kepentingan akan muncul diantara individu atau kelompok-kelompok orang. Oleh karena itu, keefektifan daerah penyangga dalam menjaga keutuhan kawasan dilindungi sangat tergantung pada arah kebijakan pola penggunaan lahan dan kelembagaannya. Jika lebih banyak situasi atau karakteristik yang menjadi sumber-sumber interdependensi dalam pengelolaan daerah penyangga dapat didefinisikan dan dipahami, maka akan lebih mudah untuk menerapkan konsep-konsep penyangga sebagai salah satu pendekatan bagi proteksi biodiversitas kawasan dilindungi. Tujuan penelitian ini adalah merumuskan kebijakan penggunaan lahan dan penataan kelembagaan daerah penyangga kawasan dilindungi.

Dalam penelitian ini diukur lima variabel latent yaitu gangguan manusia terhadap kawasan dilindungi dan invasi jenis tumbuhan anthropogenik sebagai variabel respon; pola penggunaan lahan, kapasitas rintangan dan kapasitas penyangga sumberdaya sebagai variabel eksplanatori. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data dikumpulkan dengan metode survai. Karakteristik pengaruh setiap peubah yang secara bersama-sama menerangkan gangguan manusia terhadap kawasan dilindungi dan invasi jenis tumbuhan anthropogenik dirumuskan dengan menggunakan model persamaan struktural (*structural equation model*) dengan analisis jalur (*path analysis*). Ukuran keefektifan daerah penyangga dianalisis dengan metode korelasi. Untuk menganalisis hubungan kelembagaan-perilaku-keefektifan daerah penyangga dan untuk memprediksi kinerja yang dipengaruhi oleh kebijakan penggunaan lahan penataan kelembagaan, dipakai analisis impak institusi (*institutional impact analysis*) dengan menggunakan tabel analisis Model Finsterbusch. Preskripsi dibuktikan dengan memperkirakan keberhasilan penerapannya dengan menggunakan metode *analytic hierarchy process*.

Penelitian menemukan bahwa daerah penyangga TNGP belum berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Peraturan perundang-undangan daerah penyangga belum mengatur secara jelas hak-hak pemilikan (*property rights*), batas yurisdiksi (*jurisdictional boundary*) dan aturan representasi (*rules of representation*); dan fenomena tersebut dicirikan oleh tersedianya gugus kesempatan (*opportunity set*) bagi munculkan perilaku menunggang gratis, *free access* (“bebas masuk”), *rent seeking*, oportuniste, dan destabilisasi dengan penyangga. Dengan kata lain, kelembagaan yang ada tidak mengendalikan, tetapi justru meningkatkan biaya transaksi. Untuk memasukkan *free riders*, *rent seekers*, dan *opportunists* kedalam sistem kontribusi stabilisasi daerah penyangga, diadopsi kebijakan penggunaan lahan dan penataan

¹⁾Ketua Peneliti (Staf Pengajar Departemen KSH, Fakultas – IPB); ²⁾Anggota Peneliti

kelembagaan berupa hak kepemilikan yang berbagi atas penggunaan lahan daerah penyangga melalui penyesuaian beberapa marginnya; yaitu, keberadaan “tree cover” secara permanen pada setiap bidang lahan sebagai *common property rights* dan merupakan batas yuridiksi negara atas penggunaan lahan daerah penyangga kawasan dilindungi.

Sementara itu, margin-margin penggunaan lahan lainnya, seperti pilihan produk, teknologi, investasi input, dan jangka waktu aliran produk merupakan *exclusive property rights* atas bidang lahan daerah penyangga. Kebijakan ini ditetapkan oleh pemerintah dengan mekanisme transaksi administratif. Insentif agar Perkebunan dan Perum Perhutani mengadopsi kebijakan penggunaan lahan dan kelembagaan daerah penyangga adalah berupa penguatan batas yuridiksi pada tingkat unit kelestarian produksi.